

Strategi partai komunis Indonesia terhadap petani dan pengaruhnya di Jawa Timur (1953-1965)

Ahmad Fathul Bari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20160360&lokasi=lokal>

Abstrak

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai petani. Pulau Jawa adalah wilayah Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai petani. Permasalahan utama petani di Indonesia adalah mengenai kepemilikan tanah. Satu hal yang menjadi permasalahan umum yakni polarisasi komposisi penggunaan tanah serta hak-hak yang berbeda sesuai ketentuan yang ada antara tuan tanah dengan buruh tani maupun antara kaum kolonial dengan masyarakat tani. Masalah pertanahan dan petani inilah kemudian diangkat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai isu yang penting dan dijadikan sebagai strategi perjuangannya untuk mencapai revolusi social berdasarkan ajaran marxisme. PKI mengikutsertakan masyarakat pedesaan terutama petani sebagai penyokong gerakan politik yang dilakukannya. Maklumat tanggal 3 November 1945 menyatakan bahwa pemerintah memberikan izin berdirinya partai-partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, partai-partai berusaha menjadikan pedesaan sebagai basis. Menjelang Pemilu, arahan isu yang berkembang, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkisar pada pemisahan tradisional masyarakat antara golongan priyayi, santri, dan abangan. Usaha yang dilakukan PKI dalam memenangkan pemilu adalah melakukan konsolidasi PKI terhadap golongan abangan. Langkah yang dilakukan PKI dalam mencari dukungan massa adalah dengan mengenali berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya dengan masalah agraria. Untuk tujuan itu, PKI membentuk organisasi onderbouw seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), dan sebagainya. Pada Pemilu DPR 1955, PKI menjadi tiga besar di bawah NU dan PNI. Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa daerah pedesaan Jawa Timur merupakan salah satu basis PKI terkuat dan potensial. Ketidakstabilan kabinet dalam kerangka demokrasi parlementer pada masa itu membantu PKI dalam menanjak ke puncak kekuasaan. Berkat kemenangan dalam Pemilu 1955 dan 1957, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar. Kemenangan PKI tersebut menjadikan perjuangan dalam mewujudkan revolusi sosial yang direalisasikan dalam revolusi agraria ke dalam garis kebijakan landreform. PKI mengajukan _Program Tuntutan_ atau yang juga sering disebut sebagai "Tuntutan Minimum" atau program tuntutan yang dianggap paling mendesak untuk segera dilakukan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan landreform yang diinginkan PKI tidak dapat berjalan dengan baik sehingga PKI menjalankan aksi sepihak sebagai bukti kekecewaannya.